

BAB II

KAJIAN UMUM TENTANG GOLPUT

A. Pengertian Golput

Pemilu disajikan untuk mengetahui keinginan dan kehendak masyarakat tentang apa dan siapa dalam ukuran logika rakyat yang layak untuk memimpin, memberikan perubahan ataupun perbaikan nasib bagi seluruh rakyat dalam suatu negara.¹ Partisipasi menjadi penting guna menentukan dan menilai penguasa. Pada masa orde baru, penguasa bercorak militeristik begitu kuat, kelompok civil society tak berdaya membendung berbagai kebijakan tak populis. Kondisi demikian mendorong sekelompok intelektual yang dikomandoi Arif Budiman untuk menentang ketidakadilan struktural lewat gerakan moral.

Gerakan moral ini kemudian dikenal dengan golongan putih (golput) yang dicetuskan pada 3 Juni 1971, sebulan menjelang pemilu.² Pada awalnya golput merupakan gerakan untuk melahirkan tradisi di mana ada jaminan perbedaan pendapat dengan penguasa dalam situasi apapun. Gerakan itu lahir didorong oleh kenyataan bahwa dengan atau tanpa pemilu, sistem politik waktu itu tetaplah bertopang kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Lebih-lebih dengan berbagai cara, penguasa melindungi dan

¹Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1999), 176. Lihat juga Limas Sutanto, *Memilih Pemimpin Transisional*, dalam *Siapa Mau Jadi Presiden*, (Jakarta: Buku Kompas, 2004), 14.

²www.tsanincenter.blogspot.com. 23 November 2009.

mendorong kemenangan Golongan Karya (Golkar), sehingga meminggirkan partai politik lain yang berjumlah 10 kontestan untuk dapat bertanding merebut suara secara fair. Jadi, dalam konteks ini, cikal bakal golput merupakan gerakan moral yang ditujukan sebagai “mosi tidak percaya” kepada struktur politik yang coba dibangun oleh penguasa waktu itu.³ Gerakan moral ini memberikan kesan pada publik bahwa putih dibandingkan dengan lawannya, yakni hitam, kotor.

Pada perkembangan berikutnya, golput dimaknai sebagai protes dalam bentuk ketidakhadiran masyarakat ke tempat pemungutan suara atau keengganan menggunakan hak suaranya secara baik, atau dengan sengaja menusuk tepat dibagian putih kertas suara dengan maksud agar surat suara menjadi tidak sah, dan dengan tujuan agar kertas suara tidak disalah gunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu pula.⁴

Golput juga dimaknai sebagai perilaku apatisisme (jenuh) dengan tema-tema pemilihan.⁵ Kejenuhan tersebut disebabkan oleh suatu kondisi psikologis masyarakat yang hampir tiap tahun mengalami pemilu, pilgub, pilkada dan bahkan pilkades. Disisi lain, penyelenggaraan pemilu yang berulang-ulang tak juga memberikan banyak hal terkait perbaikan nasib bagi masyarakat. Pada titik tertentu rasa jenuh tersebut sampai pada rasa tak peduli apakah dirinya masuk dalam daftar pemilih tetap atau tidak sama sekali. Dengan kata lain, golput merupakan akumulasi sikap jenuh masyarakat terhadap seputar pemilu

³[Http://www.sulis.opc/election/update.pdf](http://www.sulis.opc/election/update.pdf). diakses pada tagl 22 November 2009.

⁴Muhammad Asfar, *Presiden Golput*, (Surabaya: Jawa Pos Press, 2004), 3.

⁵[Http://tapol.gn.apc.org/elections/updates/MultiChoiseBahasa.pdf](http://tapol.gn.apc.org/elections/updates/MultiChoiseBahasa.pdf) diakses pada tanggal 20 November 2009.

baik janji politik, money politik dan kekerasan politik dan kondisi-kondisi pasca reformasi yang tak kunjung membaik.⁶

Sementara itu Priyatmoko mengartikan golput sebagai keengganan masyarakat menggunakan hak pilihnya pada even pemilu baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden maupun kepala daerah disebabkan rasa kecewanya pada sistem politik dan pemilu yang tak banyak memberikan perubahan apapun bagi kehidupan masyarakat.⁷ Lain kata, masyarakat dalam taraf ini telah berada dalam taraf kesadaran dalam memaknai pemilu. Bahwa setiap tindakan mereka dikaitkan dengan pertimbangan asas timbal balik secara seimbang.

Dari beberapa pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa golput adalah pilihan tidak memilih sebagai bentuk akumulasi rasa jenuh (apatis) masyarakat yang nyaris setiap tahun mengalami pemilihan kepala daerah, golput juga sebagai reaksi atau protes atas pemerintahan dan partai-partai politik yang tidak menghiraukan suara rakyat, perlawanan terhadap belum membaiknya taraf kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, politik, hukum dan budaya. Golput merupakan respon atas ketidakmampuan partai atau penguasa dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat yang telah menerima mandat.

⁶Soebagio, *Implikasi Golongan Putih Terhadap Pembangunan Demokratisasi di Indonesia*, dalam Jurnal Makara: Sosial Humaniora, Vol 12 No 2, Desember 2008.

⁷Priyatmoko, dkk., *Sikap Politik dan Afiliasi Orang Tua dan Perilaku Memilih Pemuda Kota Surabaya*, (Surabaya: Lembaga Penelitian Unair, 1992), 2.

B. Latar Belakang Timbulnya Golput

Golput (*non-voting behaviour*) dalam konteks politik Indonesia memiliki rentang sejarah yang panjang. Sebagaimana disebutkan di atas, pemerintahan Orde Baru ingin merombak sistem kepartaian di Indonesia, dengan mendasarkan pada konsep Ali Murtopo. Inti dari konsep tersebut adalah gagasan "massa mengambang". Konsep bahwa rakyat akan menyibukkan dirinya dalam usaha-usaha pembangunan mengingatkan seseorang pada gagasan "perkakas yang bersuara" yang biasa terdapat dalam masyarakat perbudakan. Rakyat pedesaan, yang merupakan mayoritas penduduk pada tahun 1965-75, benar-benar diarahkan hanya untuk bekerja, memproduksi dan tak memiliki kesempatan berperan dalam ranah politik.⁸

Pada gilirannya konsep tersebut membawa petaka besar bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Upaya perampangan konstantan pemilu lewat sistem try kepartaian ini nyatanya mengubah dari partisipasi politik aktif ke partisipasi politik pasif. Akibatnya menguatnya posisi negara dan rakyat terus ter subordinasi. Kenyataan ini bentuk dari intervensi negara dan hilangnya kebebasan rakyat ditengah penegakan demokrasi.

Jika pada awalnya golput hanya sebagai gerakan moral atas suatu keprihatinan, maka gerakan golput pada pemilu-pemilu berikutnya lebih dari sikap kekecewaan. Karena segah kekuatan partai dan lembaga negara dijadikan tameng kekuasaan semata. Para elit politik hanya menjadi corong penguasa. Pada era ini golput menjadi bentuk kekecewaan dan perlawanan,

⁸Rudi Harotono, *Gerakan Golput dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, dalam <http://lmnd.wordpress.com>.

karena rakyat tidak cukup berani melawan dalam bentuk revolusi berhadapan dengan kekuatan militer. sebagaimana dikatakan Closky bahwa:⁹

“Ada yang tidak ikut pemilihan karena sikap acuh tak acuh dan tidak tertarik oleh, atau kurang paham mengenai, masalah politik. Ada juga karena tidak yakin bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah akan berhasil dan ada juga yang sengaja tidak memanfaatkan kesempatan memilih karena kebetulan berada dalam lingkungan dimana ketidak ikut sertaan merupakan hal yang terpuji”.

Pada Pemilu 2004, angkat golput begitu tinggi dan angka ini juga menjalar kepemilihan kepala daerah. Golput selain dipicu oleh kekecewaan terhadap elit-elit partainya serta pada pemerintah juga sebagai bentuk perlawanan. Di samping itu, golput terjadi sebagai akibat dari polarisasi kepemimpinan politik dalam masyarakat atas dasar simbiosis antara patron dan klient-nya manakala sang patron tidak terakomodasi dalam struktur politik tertentu.¹⁰

Menurut Varma terjadinya golput dinegara berkembang seperti Indonesia lebih disebabkan oleh rasa kecewa dan apatisme:¹¹

“Di negara berkembang lebih disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan hasil pemilu yang *kurang amanah* dan memandang nilai-nilai demokrasi belum mampu mensejahterakan masyarakat. Kondisi ini jelas akan mempengaruhi proses demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena terjadi paradoks demokrasi atau terjadi kontraproduktif dalam proses demokratisasi”.

⁹McClosky, H. *Political Participation, International Encyclopedia of The Social Science*, (2nd ed.). (New York: The Macmillan Company and Free Press, 1972), 20.

¹⁰Gandung Ismoro. “Memahami Eksistensi Golput dalam Demokrasi”, dalam <http://lanskap-artikel.blogspot.com/2008/10/memahami-eksistensi-golput-dalam.html>. diakses tanggal 27 Desember 2007.

¹¹ Varma, S.P. *Teori Politik Modern*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 295.

Secara empirik peningkatan angka Golput tersebut terjadi antara lain oleh realitas sebagai berikut: *Pertama*, pemilu dan Pilkada langsung belum mampu menghasilkan perubahan berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, menurunnya kinerja partai politik yang tidak memiliki *platform* politik yang realistis dan kader politik yang berkualitas serta komitmen politik yang berpihak kepada kepentingan publik, melainkan lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau golongannya. *Ketiga*, merosotnya integritas moral aktor-aktor politik (elit politik) yang berperilaku koruptif dan lebih mengejar kekuasaan/kedudukan daripada memperjuangkan aspirasi publik. *Keempat*, tidak terealisasinya janji-janji yang dikampanyekan elit politik kepada publik yang mendukungnya. *Kelima*, kejenuhan pemilih karena sering adanya Pemilu/Pilkada yang dipandang sebagai kegiatan seremonial berdemokrasi yang lebih menguntungkan bagi para elit politik. *Keenam*, kurang netralnya penyelenggara Pemilu/Pilkada yang masih berpotensi melakukan keberpihakan kepada kontestan tertentu, di samping juga kurangnya intensitas sosialisasi Pemilu secara terprogram dan meluas.

Karena itu golput mengindikasikan adanya beberapa hal berikut ini: (1) perlawanan terhadap rejim (2) ketidakpercayaan terhadap sistem dan calon yang ada (3) kekecewaan yang besar terhadap pemerintah dan system, serta (4) putusnya harapan rakyat akan lahirnya sistem dan kepemimpinan yang mampu mengayomi mereka. Dan terkadang, hanya dengan cara demikian

kemampuan demokrasi yang mengandalkan berfungsinya *check and ballances* itu dapat tercipta, kendati tidak selalu demikian adanya.¹²

Selain alasan di atas, nyatanya perilaku golput juga bagian dari refleksi hal-hal sebagai berikut :

Pertama, apatisisme politik, yaitu sikap tidak berminat atau tidak menaruh perhatian terhadap orang, situasi, atau gejala-gejala umum yang berkait dengan persoalan politik dan kelembagaannya. *Kedua*, sinisme politik merupakan sikap yang dimiliki sebagai penghayatan atas tindakan dan motif orang atau lembaga lain dengan perasaan curiga. Orang-orang sinis selalu menganggap politik itu kotor, bahwa semua politisi tak dapat dipercaya, bahwa rakyat selalu menjadi korban manipulasi partai dan penguasa, dan bahwa setiap rejim selalu dipimpin orang tak amanah. *Ketiga*, alienasi merupakan perasaan keterasingan dari kehidupan politik dan pemerintahan, sehingga selalu memandang segenap peraturan yang ada sebagai tidak adil dan menguntungkan penguasa, dan *keempat*, anomie yaitu perasaan kehilangan nilai dan orientasi hidup, sehingga tak bermotivasi untuk mengambil tindakan yang berarti karena hilangnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik yang ada.¹³

Berdasarkan kerangka demikian, menurut Hendar di golput juga merupakan pilihan rasional bila dilihat dari kacamata berikut ini:¹⁴ *Pertama*, pilihan golput harus dilihat sebagai upaya membuka ruang kebebasan pemilu

¹²<http://www.tsanincenter.blogspot.com>. diakses pada tanggal 23 November 2009.

¹³Gandung Ismoro. "Memahami Eksistensi Golput dalam Demokrasi", dalam <http://lanskap-artikel.blogspot.com> memahami-eksistensi-golput-dalam.html.

¹⁴Kompas, 06/04/07.

yang lain. Memilih atau mencoblos suatu partai atau calon presiden bukanlah satu-satunya pilihan. Warga negara membuka suatu ruang lain dalam mengekspresikan pilihannya untuk tidak memilih partai atau calon presiden apa pun karena pertimbangan-pertimbangan rasional dan teologis. *Kedua*, munculnya golput di Indonesia pada awal dasawarsa 1970-an adalah ekspresi sikap kritis. *Ketiga*, menyimak perilaku politisi baik di pusat dan daerah, telah banyak mengecewakan warga negara yang telah memilihnya.

C. Teori Perilaku Golput

Secara garis besar perilaku golput (*voting behavior*) dapat didekati dari dua model, yaitu:

1. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan sosiologi ini disebut juga madhab Columbia (*The Columbia School of Electoral Behavior*). Pendekatan ini menjelaskan karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku memilih seseorang. Pengelompokan seperti umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-perempuan), agama dan semacamnya diyakini punya peranan penting mengkonstruksi pola pikir pemilih.

Pemahaman akan ikatan-ikatan keagamaan, profesi, kelompok bisnis, keluarga dan kelompok informal merupakan sesuatu yang sangat

vital. Dean Jaros menguatkan bahwa perilaku politik seseorang berhubungan erat dalam satuan keanggotaan kelompok tertentu.¹⁵

Gerad Pomper lebih tegas menjelaskan pengaruh pengelompokan sosial dalam kaitanya dengan perilaku golput. Baginya perilaku golput dapat diletakkan dalam bingkai predisposisi sosial-ekonomi keluarga pemilih dan predisposisi sosial-ekonomi pemilih sendiri. Keduanya mempunyai hubungan signifikan dengan perilaku memilih seseorang. Maksudnya kondisi ayah dan ibu pemilih akan berpengaruh pada perilaku politik anak, termasuk dalam memilih agama yang dianut, tempat tinggal, dan kelas sosial.¹⁶

Hubungan agama, organisasi sosial dan pilihan politik misalnya dapat dilihat pada masyarakat Madura yang mayoritas santri dimana sebagian besar afiliasi politiknya ke PKB dan PPP sebagai basis partai relegius.

Artinya pendekatan sosiologi melihat perilaku golput seseorang sangat dipengaruhi oleh bagaimana pola hidup seseorang dan bagaimana dia menempatkan dirinya dalam katagori-katagori sosial di atas. Kelompok sosial itulah yang turut membentuk kesadaran ataupun kehendak perilaku politiknya.

¹⁵Dean Jaros, et al, *Political Behavior, Choice and Perspectives*, (New York : St. Martin's Press, 1974), 111-124.

¹⁶Gerad Pomper, *Voter's Choice : Varieties of American Electoral Behavior*, (New York : Dod, Mead Company, 1978), 196-200.

2. Pendekatan Psikologi

Pendekatan psikologi berkembang di Michigan yang dipelopori oleh August Cambell. Ketidak puasan pendekatan sosiologi melahirkan pendekatan psikologi. Konsep yang dikembangkan adalah konsep sosialisasi dan sikap-dalam melihat perilaku memilih. Aktivitas memilih sangat ditentukan oleh kekuatan sosialisasi yang diterima oleh anak sejak masa kecil. Oleh karena itu, dalam pendekatan psikologi ditekankan pada tiga aspek utama, yaitu: ikatan emosional pada suatu partai politik tertentu, orientasi isu-isu dan orientasi pada kandidat.¹⁷

Bagi psikolog, sikap merupakan refleksi fungsi kepentingan. Penilaian terhadap suatu obyek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut. Sikap juga berfungsi sebagai penyesuaian diri. Individu bersikap tertentu merupakan akibat dari keinginan orang tersebut untuk sama ataupun beda dengan orang lain, termasuk panutannya. Sikap juga berfungsi untuk mengatasi konflik internal, seperti idalisasi, rasionalisasi dan indentifikasi.

Sikap bukanlah suatu hal yang langsung jadi, terdapat proses panjang yang membentuknya baik melalui informasi, maupun pendisiplinan. Maka sikap seseorang dibentuk sejak kecil hingga dewasa, sikap politikpun ditentukan pada saat dewasa ketika menghadapi situasi di luar keluarga yang itu dipengaruhi oleh kelompok acuan, organisasi,

¹⁷Richard G. Niemi and Herbet F. Wisberg, *Controversies of Voting Behavior*, (Washington D.C: A. Devision of Congsional Quarterly Inc, 1984), 12-13.

asosiasi dan partai politik.¹⁸ Sosialisasi membentuk ikatan psikologi yang begitu kuat antara seseorang dengan organisasi kemasyarakatan atau partai politik yang berupa simpati. Selanjutnya ikatan itu mewujud dalam bentuk identifikasi.

Selain dua model pendekatan di atas, terdapat hal lain yang mempengaruhi seseorang untuk tidak memilih, yaitu:

1. Faktor Psikologi

Pribadi yang tak toleran, otoriter dan acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, dan sejenisnya cenderung sikap politiknya abstain (golput). Sebab apa yang diperjuangkan oleh kandidat atau partai tidak selamanya sejalan dengan kepribadian tersebut. Pribadi-pribadi tak toleran cenderung menarik diri dari pentas politik. Maka sikap apatis merupakan jelmaan dari pribadi yang otoriter.

2. Faktor Sosial-ekonomi

Tingkat pendidikan yang tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, disamping seseorang dimungkinkan menguasai aspek-aspek birokrasi baik pada saat pendaftaran ataupun pada waktu pemilihan. Demikian juga pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja disektor yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi partisipasinya dalam

¹⁸David Apter, *Pengantar Analisa Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1976), 262.

pemilu dibandingkan dengan pemilih yang bekerja disektor yang tidak berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

3. Faktor Kepercayaan Politik

Ketidak aktifan pemilih (golput) merupakan bentuk ketidakpercayaan pada sistem politik. Maka golput merupakan tindakan pada apa yang disebut tidak mendukung sistem politik yang sedang dijalankan.

D. Golput dan Demokrasi

Golput (*non-voting behaviour*) dipahami sebagai bentuk partisipasi politik warga negara yang muncul karena beragam latar belakang. Memilih adalah hak (*right*) politik warga negara yang *by its nature* mengandung arti *legal or moral entitlement (authority to act)*, yang mengandung kebebasan pemilik hak itu untuk menggunakan atau tidak menggunakannya. Karena esensi filosofis inilah maka demokrasi memberi ruang bagi pilihan untuk golput secara setara dengan pilihan untuk memilih.¹⁹

Golput diberi ruang dalam demokrasi, guna meluruskan demokrasi, meluruskan politik dan pemerintahan yang korup melalui gerakan moral. Bagi kalangan pendukung golput, golput diancangkan sebagai gerakan *check and balances* yang dalam demokrasi dibutuhkan.²⁰ Disisi lain, eskalasi golput juga sangat menghawatirkan perkembangan demokrasi yang berkualitas karena

¹⁹Asfar, *Presiden Golput..* 13.

²⁰Ibid..126.

merosotnya kredibilitas kinerja partai politik sebagai mesin pembangkit partisipasi politik. Kehawatiran ini juga dikemukakan Anthony Giddens “haruskah kita menerima lembaga-lembaga demokrasi tersingkir dari titik di mana demokrasi sedang marak”.

Demokrasi identik dengan kebebasan dan partisipasi dari semua kekuatan demokrasi. Kekuatan demokrasi dimaksud di dalamnya termasuk masyarakat, selain juga partai politik dan organisasi masyarakat. Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri dari modernisasi politik. Sikap dan persepsi bagian penting dari pesta demokrasi. Maka tingginya angka golput menandakan sistem politik dan sistem pemilu yang sedang dijalankan belum berada dalam ruang demokrasi sesungguhnya. Huntington dan Nelson memaknai partisipasi politik sebagai:²¹

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi biasa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, marap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Dengan demikian, partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan politik rakyat secara pribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau kegiatan politik lain (golput) yang dipandang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik oleh pemerintah. Partisipasi politik tidak

²¹Huntington, S.P. & Nelson, J. *No Easy Choice Political Participation in Developing Countries*. (Cambridge: Harvard University Press, 1994), 4.

mencakup kegiatan pejabat-pejabat birokrasi, pejabat partai, dan *lobbyist professional* yang bertindak dalam konteks jabatan yang diembannya.

Sementara Budiardjo memaknai partisipasi politik sebagai: Kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan Pemerintah (*public policy*).²² Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau dengan anggota parlemen, dan sebagainya”.

Merujuk pemikiran politik tersebut dalam konteks sejarah penyelenggaraan pemilihan umum sebagai pesta demokrasi, secara empirik dapat dicermati tingkat partisipasi politik dan perkembangan golput di Indonesia.

Tingginya partisipasi rakyat pada penyelenggaraan pemilu masa Orde Baru bukan berdasarkan apa yang dikatakan Budiharjo sebagai kesukarelaan, melainkan mobilisasi massa yang sengaja digerakkan. Maka partisipasi demikian merupakan partisipasi semu, partisipasi yang didasarkan pada harmonisasi dan suatu waktu akan menjadi ledakan emosi seperti lahirnya gelombang golput di era reformasi. Penilaian Huntington dapat menjelaskan dengan cermat tentang hal tersebut yang menyatakan:²³

²²M. Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parleментар dan Demokrasi Pancasila*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), 183.

²³Huntington, S.P. & Nelson, J. *No Easy Choice Political*...10.

“Beberapa studi secara eksplisit tidak menganggap tindakan yang dimobilisasikan atau yang dimanipulasikan sebagai partisipasi politik, yaitu lebih menekankan sifat sukarela dari partisipasi dengan argumentasi bahwa menjadi anggota organisasi atau menghadiri rapat-rapat umum atas perintah pemerintah tidak termasuk partisipasi politik”.

Lebih lanjut Huntington membedakan partisipasi politik ke dalam dua karakter, yaitu:²⁴

- a. Partisipasi yang demokratis dan otonom adalah bentuk partisipasi politik yang sukarela;
- b. Partisipasi yang dimanipulasi, diarahkan, dan disponsori oleh pemerintah adalah bentuk partisipasi yang dimobilisasikan

Oleh karenanya, tingginya angka golput dapatlah dirumuskan bagian dari kesadaran perilaku politik. Dalam tahapan demokrasi elektoral atau demokrasi prosedural, golput adalah manifestasi politik, dimana rakyat tidak berpartisipasi politik (menggunakan hak pilihnya) secara sukarela dalam pemilihan umum sebagai pesta demokrasi. Secara faktual fenomena golput tidak hanya terjadi di negara demokrasi yang sedang berkembang, di negara yang sudah maju dalam berdemokrasi pun juga menghadapi fenomena golput, seperti di Amerika Serikat yang capaian angka partisipasi politik pemilihnya berkisar antara 50% s/d 60%, begitu pula di Perancis dan Belanda yang angka capaian partisipasi politik pemilihnya berkisar 86%.

Karenanya fenomena Golput menjadi pembelajaran bagi partai politik dan penguasa untuk meningkatkan kinerjanya sebagai mesin kerja demokrasi

²⁴ Ibid., 11.

yang efektif dan memiliki komitmen yang kuat, mewujudkan good public governance. Ketidakmampuan partai politik dan pemerintah menampilkan kinerja tersebut, maka fenomena Golput akan mengkristal menjadi faktor internal demokrasi yang potensial menimbulkan pembusukan demokrasi atau pembusukan politik (*Political Decay*), sehingga akan berimplikasi melumpuhkan demokrasi, dimana partai politik sebagai mesin pembangkit partisipasi politik dalam demokrasi secara moral ikut bertanggungjawab.

Kiranya perlu mendapatkan apresiasi dan solusi oleh para aktor-aktor pemerintahan (penyelenggara negara) agar pesta demokrasi lebih efisien dan berkualitas secara sistemik, baik dalam tataran input, process, dan output, dan malah bukan bersifat kontra produktif dalam berdemokrasi.

Sebab bagaimanapun juga golput merupakan bagian dari indikator keberhasilan pemilu yang demokratis. Artinya kehadiran golput justru mendorong peningkatan kualitas proses dan bangunan demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, golput dapat diletakkan bagian dari gerakan sosial yang menghendaki adanya perubahan sosial, politik, ekonomi dan sebagainya.

Salah satu pendekatan teori-teori ilmu sosial yang justru melihat gerakan sosial sebagai “fenomena positif”, atau sebagai sarana konstruktif bagi perubahan sosial. Pendekatan ini merupakan alternatif terhadap fungsionalisme, pendekatan sosial semacam ini selanjutnya dikenal dengan “teori konflik”. Teori konflik pada dasarnya menggunakan tiga asumsi dasar, yaitu: (1) Rakyat dianggap sebagai sejumlah kepentingan dasar dimana mereka akan berusaha secara keras untuk memenuhinya, (2) Kekuasaan

adalah inti dari struktur sosial dan hal ini melahirkan perjuangan untuk mendapatkannya, dan (3) Nilai dan gagasan adalah senjata konflik yang digunakan oleh berbagai kelompok untuk mencapai tujuan masing-masing, dari pada sebagai alat mempertahankan identitas dan menyatukan tujuan masyarakat.²⁵

Pada dasarnya, gerakan sosial senantiasa berkaitan dengan perubahan menuju suatu arah yang dianggap ideal oleh para penggerakannya. Dengan bahasa lain, gerakan sosial dan perubahan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Asal usul gerakan sosial dapat ditelusuri dari reaksi para pemikir Perancis. Sebut saja tokoh seperti Marx dan Engels, Gramsci serta Lenin untuk mewakili gerakan ini.²⁶

E. Tujuan Golput

Bagi pendukung golput, perilaku tidak memilih bagian dari tindakan yang memiliki pesan. Karenanya golput bukan tanpa tujuan, golput menjadi alat protes politik yang tidak sempat tersuarakan, akumulasi kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap realitas politik yang dilihat kemudian disalurkan melalui sikap apatis terhadap pemilu.²⁷ Sebab itu, melihat golput harus dapat mengkontekstualisasikan dengan keadaan dan realitas yang berkembang. Interpretasi perilaku politik tidak dapat diserahkan pada penjelasan teoritis

²⁵Santoso, Slamet. *Gerakan Sosial dan Teori Hegemoni*, <http://ssantoso.blogspot.com>.

²⁶Sidney Tarrow, *Power in Motion: Social Movement, Collective Action and Politics*, (New York: Cambridge University Press, 1994), 123.

²⁷Asfar, *Presiden..* 127.

semata. Namun juga harus diletakkan pada logika pendukung golput itu sendiri untuk menangkap makna dan substansi: pesan apa yang hendak disampaikan kepada publik atas pilihan politiknya untuk tidak memilih.

Sebagian pemilih tidak menggunakan haknya hanya untuk menunjukkan sekedar rasa malasnyanya. Malas berdasarkan kesadarannya bahwa politik tidak dapat menjamin perbaikan hidupnya. Hidup dan mati mereka tidak bisa ditentukan oleh hasil pemilu. Terlebih pemilu dan politik cenderung diwarnai oleh pertikaian kepentingan sesaat. Sebagian yang lain tidak menggunakan hak pilihnya untuk menunjukkan ketidak sukaannya dengan sistem politik yang dibangun, pemerintahan yang sedang berkuasa, tiadanya rasa amanah pemimpin yang sedang berkuasa, carut-marutnya supremasi hukum dan semacamnya. Sebagian lainnya juga melakukan golput untuk mengutarakan kegusarannya atas perilaku elit politik yang tak sesuai dengan janji-janji saat pemilu.²⁸

Maka perilaku golput sejujurnya secara umum dimaksudkan sebagai simbol protes atas sistem yang tidak adil, sistem yang hanya menguatkan posisi kelompok minoritas (elit) dan mengabaikan substansi demokrasi yang bertujuan membangun peradaban masyarakat yang lebih baik. Yang terpenting lagi adalah golput ditujukan pada tiadanya amanah dari elit dan pemimpin bangsa dalam menjalankan roda kekuasaannya. Protes tersebut ditujukan pada pemerintah yang korup dan tidak akuntabel. Maka kondisi demikian menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat luas.

²⁸Ibid.

Sistem politik yang dikembangkan pemerintah sejak orde baru hingga orde reformasi ini dinilai tidak mampu membangun demokrasi yang sehat, baik pada tingkat elit maupun pada wilayah massa. Praktek kongkalikong, kolusi dan nepotisme cermin yang terang akan fakta dan realitas politik yang ada akibat elit politik yang memegang etika dan tanggung jawab atas kekuasaan yang diraihinya. Parlemen yang seharusnya konsisten dengan fungsinya, juga ikut ambil bagian dari cerita buram ini. Inilah bentuk ketidakjelasan sistem yang dijalankan dan melahirkan anak ideologis yang disebut golongan putih (golput).²⁹

Pendukung golput tidak hanya berasal dari satu garis partai, melainkan seluruh partai dan organ-organ sosial. Semuanya melihat dengan jelas betapa massif retorika politik yang dibangun untuk mengelabui rakyat. Karenanya parlemen dan pemerintah dinilai penyebab lahirnya diskriminasi sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya di negara ini.

Golput pada pemilu 2004 dan 2009 juga ditujukan sebagai reaksi pada sistem pemilu yang amburadul, mulai dari pendataan hak pilih, ketentuan partai politik sebagai peserta dan mekanisme penentuan calon, yang semuanya dinilai masih tidak mencerminkan kemauan rakyat.³⁰ Terlebih pemilu 2004 juga tidak bisa menjanjikan perubahan, lebih ironis lagi sistem pemilu 2004 dinilai mengalami kemunduran dari pada pemilu-pemilu sebelumnya.

²⁹Ibid., 128.

³⁰Ibid., 149.

Gerakan golput yang sempat menurun pada pemilu 1999, mulai meninggi lagi pada 2004, berbagai kegagalan pembuatan UU pemilu di DPR turun menyuburkan golput. Sebab itu, golput hadir bukan tanpa dasar. Pertama, perumusan UU pemilu lebih mencari titik temu antar kepentingan elit dari pada substansi kualitas pemilu dan demokrasi.³¹ Kedua, sistem pemilu proporsional diyakini tak akan menjanjikan apapun. Ketiga, tidak tegasnya ketentuan 30 persen kuota politisi perempuan, dan keempat, amburadulnya DPT nasional yang terbongkar pada pilgub Jatim lalu juga menjadi alasan mereka untuk kecewa dan tak percaya dengan pemilu. Maka tak ayal gerakan golput tak dapat dibendung.

F. Bentuk-Bentuk Golput

Perilaku *nonvoting* adalah refleksi protes atau ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berjalan.³² Karena itu bentuk perilaku golput yang ditampilkan tidak seragam, melainkan beragam. Sekalipun demikian, perilaku golput dalam pemilu diwujudkan secara umum dalam bentuk:

1. Memilih tidak hadir ke bilik suara. Sikap ini tidak lain merupakan bentuk protes yang paling nyata. Sikap apatis dan tak mau menggunakan hak pilihnya ini didasarkan pada empat hal, yaitu :
 - a. Sebagai reaksi terhadap pemerintah, anggota DPR dan partai politik yang tak mampu memperbaiki kehidupan ekonomi, sosial dan hukum.

³¹Ibid.. 150.

³²Arbi Sanit, *Aneka Pandangan Fenomena Golput*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), 2.

Berbagai kebijakan pemerintah telah jauh keluar dari *track* demokrasi, yaitu menyejahterakan kehidupan rakyat.

- b. Tidak adanya nilai lebih dari proses pemilu ini. Sehingga mereka merasa rugi menghadiri pemilu baik secara tenaga, waktu dan finansial. Nilai lebih ini meliputi kualitas pemilu yang dengannya masyarakat merasa nyaman dan yakin akan pemerintahan yang akan memimpin karena lahir dari proses jujur dan adil.
- c. Adanya hal yang lebih penting dari sekedar hadir ke bilik suara. Hal penting ini dikaitkan dengan nilai lebih di atas. Artinya jika dengan memberikan suarapun tak dapat merubah apapun, maka mereka berkeyakinan lebih baik tidak datang.
- d. Ketidak hadiran karena malas saja, mereka tak mau repot dengan politik yang dinilai kotor.³³

Cara ini ditempuh sebagai bentuk penyadaran dan membuka mata para pejabat negara, elit politik, anggota dewan dan aktivis partai politik bahwa selama ini rakyat selalu diabaikan dan dibutuhkan pada saat pemilu saja.

2. Mencoblos semua gambar atau gambar kandidat lebih dari satu kali. Cara ini dipilih didasarkan pada :

³³Asfar, *Presiden...* 244-245.

- a. Kehadiran mereka tetap sebagai bentuk protes, walaupun mereka hadir itu dengan tujuan agar kertas suara mereka tak digunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.
 - b. Isu-isu yang dibawa semua partai dan kandidat hanyalah retorika saja, maka respon pendukung golput dengan mencoblos semuanya sebagai jawaban yang menurut pendukung golput rasional.
 - c. Pemilu di Indonesia bagi pendukung golput belum bisa dijalankan secara jujur dan adil, maka pilihan mencoblos semua gambar diyakini paling realistis.
 - d. Memberikan dorongan pada publik agar publik tampil berani menampilkan kekecewaannya secara terang-terangan, tanpa rasa takut.
3. Memasukkan kertas suara ke kotak secara kosong (tanpa dicoblos). Cara ini merupakan cara yang paling lemah dalam pandangan pendukung golput. Hal ini dilakukan sebagai sikap transparan dan dengan tujuan mereka yang selama ini takut melampiaskan kekecewaannya mendapatkan teman sehingga punya keberanian.